

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di beberapa negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan kontributor utama dalam proses pembangunan. Namun, ada juga di sejumlah negara, LSM bersifat lemah atau lebih berperan sebagai oposisi daripada peran operasional dan pemerintah sangat curiga terhadap mereka. Contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melengkapi upaya pemerintah dalam penyediaan layanan kesejahteraan adalah seperti di negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi, keduanya diharapkan mendapatkan keuntungan besar dan mencapai tujuan pembangunan bersama. Hubungan antara negara dan LSM telah menjadi topik perdebatan yang menarik dari tahun 1980-an, bertepatan dengan model ekonomi neo-liberal yang dikemukakan oleh World Bank dan Dana Moneter Internasional yang mendefinisikan kembali peran LSM di negara berkembang (Hopper 2012, 12). Saat ini, sebagian besar LSM mengisi kekosongan dengan memberikan layanan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam hubungan antar negara dengan LSM ini, paling tidak yang diminta LSM adalah lingkungan yang memungkinkan untuk berfungsi dengan baik. Idealnya, peran LSM adalah mengisi kekosongan apabila negara tidak memadai dalam menjalankan perannya dan seringkali memotong birokrasi untuk memberikan bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan (Hopper 2012, 13). Fenomena ini menunjukkan bahwa penyedia utama layanan adalah negara dan

LSM yang memainkan peran yang saling melengkapi. Maka dari itu, paradigma neoliberal menempatkan negara dalam peran fasilitasi dimana sebagian besar pendorong berasal juga dari LSM (Klinken 1998, 349). Kebijakan ekonomi neoliberal beranggapan bahwa negara harus menjalankan fungsi minimum (Hopper 2012, 12).

Meskipun situasi ini masih menyisakan ruang bagi negara dan LSM untuk berkolaborasi, perannya harus didefinisikan dengan jelas dan jika tujuannya saling menguntungkan antara negara dan LSM, negara diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang memungkinkan LSM berfungsi dengan baik. Menurut Tandon (1987), sejauh mana LSM memilih dan dapat memengaruhi pemerintah sangat bergantung pada tiga kategori rezim yang memberikan ekosistem yang sangat berbeda untuk LSM. Misalnya, negara dengan militer dan kediktatoran, negara partai tunggal, dan negara demokrasi liberal (Clark 1992). Ketiga rezim ini menunjukkan bahwa pendekatan akan bergantung pada lingkungan, seperti kolaborasi yang lebih memungkinkan terjadi di negara demokrasi liberal. Adapun pada rezim lainnya, LSM dapat dianggap sebagai blok oposisi *de facto* untuk memajukan agenda lain.

Lingkungan pendukung juga berarti upaya pemerintah untuk menyediakan lingkungan yang stabil. Pemerintah diharapkan dapat mengontrol dan memiliki struktur untuk memberikan keamanan kepada rakyatnya dan jika perlu melakukan intervensi jika ada ketegangan antar kelompok sosial. Ada hubungan mendasar antara efektivitas fungsi negara dan stabilitas politik serta kelangsungan demokrasi yang berkelanjutan (Whaites 1998, 344). Peran terpenting negara dan LSM adalah

kolaborasi dalam proyek pembangunan. Alih-alih dipandang sebagai pesaing negara, LSM adalah mitra potensial dengan manfaat lebih besar yang diwujudkan melalui kolaborasi dan bukan persaingan.

Negara dan LSM memiliki kepentingan bersama dalam kolaborasi yang lebih erat tidak diragukan lagi (White 1999, 309). Bagi LSM, bekerja dengan negara menawarkan kesempatan untuk memperluas cakupan operasi mereka, memperluas pengaruh mereka dan berpartisipasi dalam perumusan agenda pembangunan nasional. Di sisi lain, negara mungkin melihat kolaborasi dengan LSM sebagai kesempatan untuk mendapatkan kehormatan moralitas, menetralkan potensi oposisi, dan mencapai implementasi kebijakan yang lebih efisien dan hemat biaya. Dua elemen penting dalam hubungan semacam ini adalah upaya negara untuk tetap relevan dalam penyediaan layanan kesejahteraan, dengan mengakses dana lembaga donor melalui LSM dan menghilangkan pertentangan yang semakin meningkat jika LSM berada di pihak lain. Dengan bekerja sama dengan LSM, negara dipandang memajukan agenda bersama seperti yang disarankan oleh para penyumbang yang secara tidak langsung mengatur agenda.

Namun, posisi White pada mutualitas didasarkan pada asumsi skenario sempurna yang jarang terjadi. Terlepas dari kepentingan bersama yang mungkin ada antara negara dan LSM, peran yang telah dikonstruksikan untuk LSM menempatkan organisasi tersebut pada pihak lain dan bukan pada pihak yang sama dengan pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Edwards dan Hulme (1996), LSM dan organisasi masyarakat secara fundamental diberikan peran kunci dalam proses demokratisasi oleh badan-badan bilateral dan multilateral, mereka

dipandang sebagai komponen integral dari masyarakat sipil yang berkembang dan penting untuk menyeimbangkan kekuasaan negara, membuka saluran komunikasi dan partisipasi, menyediakan tempat pelatihan bagi para aktivis, dan mempromosikan kemajemukan/pluralisme (Zaidi 1999, 262).

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Indonesia merupakan contoh LSM dengan model kerangka kerja berbentuk *Collaboration*. Di tingkat global dan nasional, INFID memiliki tujuan dalam mewujudkan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial dan juga menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap manusia. LSM ini didirikan sejak tahun 1985, yang sejak awal eksistensinya memerankan kedudukan yang signifikan dari aspek pembangunan serta perjalanan demokratisasi Indonesia. Pendirian LSM inipun tidak lepas dari hasil dan jerih payah tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa seperti Wukirsari, Kartjono, Gus Dur, Zoemrotin KS, Dawam Rahardjo, Asmara Nababan, Fauzi Abdullah, Afam Buyung Nasution, dan Gaffar Rahman. Pada tahun 2004, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC), INFID menyanggah status konsultatif, serta diverifikasi dan dipastikan akreditasinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di tingkat global, keberadaan INFID termasuk eksis. INFID adalah bagian dari forum international untuk LSM tingkat nasional (IFP) yang berada di Perancis. IFP merupakan LSM internasional yang menjembatani dan menjadi wadah untuk seluruh LSM nasional yang ada di dunia sejak tahun 2009. Peran penting dari INFID juga dapat dilihat dari perjalanan demokrasi di Indonesia pada tahun 1985-2000, dimana pada saat itu, Indonesia terpaksa mengikuti perintah di bawah sistem

otoriter yang dipimpin oleh Soeharto. INFID turut memberi kontribusinya melalui berbagai cara dan usulan regulasi terkait HAM, *rule of law*, hak-hak buruh, kebebasan pers, kesetaraan gender, dan partisipasi aktif dari warga. Tak hanya itu, dari tahun 2000 hingga pada tahun 2007, isu peminjaman uang luar negeri Indonesia yang menjadi prioritas utama pemerintah dan lembaga-lembaga donor pun terbukti berhasil INFID singkirkan.

Atas berkat penyelenggaraan forum dua tahunan INFID (1998-2004), yang mengangkat isu bocornya pinjaman hingga sebesar 30% dari World Bank untuk proyek-proyek di Indonesia, regulasinya dan pelaksanaannya oleh lembaga donor, dan lembaga keuangan pun telah berubah menjadi lebih baik. Selain itu, pada tahun 2007-2011, INFID juga terbukti sukses mendorong akuntabilitas pemerintah Indonesia dalam sasaran keberhasilan *Millennium Development Goals* (MDGs) 2015. Setelah berakhirnya agenda MDGs 2015, agenda pembangunan itu diperbaharui dan dilanjutkan menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

Perhatian INFID pun difokuskan dan semakin intensif untuk mendukung implementasi dan pencapaian poin-poin yang terdapat dalam SDGs, dimana INFID berfokus pada tiga area kegiatan, yakni: HAM dan demokrasi, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan penurunan ketimpangan di Indonesia. Penelitian ini dengan rinci membahas salah satu dari antara ketiga area kerja INFID diatas, yaitu mengenai peran INFID dalam mendukung implementasi program SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Agenda pembangunan SDGs memiliki ciri khas yang terbuka dan inklusif, dimana adanya peran yang diberikan secara merata pada semua negara di dunia, yakni negara yang maju, negara yang masih berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk turut ikut berpartisipasi aktif dalam aspek pembangunan, sehingga setiap negara memiliki kedudukan dan kewajiban yang setara dalam meraih SDGs. Pada tahun 2013, Sekretaris Jendral PBB mewadahi kesempatan kepada pemangku kepentingan nonpemerintah untuk turut hadir dan terjun langsung dalam perjalanan perancangan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Melalui pertemuan konsultasi antara para pemangku kepentingan dengan *My World Survey*, survei yang dilakukan oleh PBB dalam rangka mengumpulkan aspirasi untuk perancangan SDGs.

Keluaran dari survei inipun yang turut menjadi salah satu kajian dalam menyusun 17 tujuan SDGs. Agenda pembangunan SDGs menganut 5 prinsip (5P), yakni: *Peace* (perdamaian), *Partnership* (kerjasama), *Planet* (bumi), *Prosperity* (kemakmuran), *People* (manusia), yang kelimanya memiliki kesinambungan antara sosial, ekonomi, lingkungan. Prinsip-prinsip ini mengikat 17 tujuan dan 169 sasaran yang saling bergandengan, membentuk kesatuan dan menjalin hubungan baik antara sesama guna mencapai kesejahteraan kehidupan manusia. Para pemerintah dari seluruh negara yang menyetujui agenda SDGs tentunya bersinergi dan berada dalam satu pencapaian besar untuk memajukan sektor pendidikan, memulihkan kualitas kesehatan, mengeliminir kemiskinan, menurunkan angka ketimpangan, dan memberantas kelaparan.

Tiap-tiap individu dari seluruh golongan nantinya turut mengimplementasikan agenda SDGs, dengan mendahulukan golongan yang tertinggal. Dengan kemitraan atau kerja sama yang dibangun disini antar negara dan aktor non-negara, seperti LSM, agenda-agenda yang berkaitan secara seksama akan dilaksanakan agar meraih pencapaian SDGs yang efektif. Dari fenomena ini, penulis ingin melihat bagaimana peran INFID sebagai LSM yang salah satu fokus kerjanya adalah SDGs, turut berkontribusi mengimplementasinya pada tahun 2015 – 2016, tepat setelah sahnya agenda global tersebut, dan sebelum lahirnya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan agenda SDGs tersebut di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan yang tertuang di latar belakang, dapat dilihat bahwa landasan hukum untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia pada tahun 2015 - 2016 masih dalam proses persiapan. Dengan ini, sebelum lahirnya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan program SDGs di Indonesia, penulis merumuskan permasalahan ke dalam pertanyaan penelitian, “Bagaimana peran INFID dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015 - 2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran INFID sebagai LSM yang aktif dan penting dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada

tahun 2015 – 2016 secara spesifik, sebelum lahirnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan program SDGs di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi yang dilakukan penulis, dibagi menjadi dua aspek, antara lain: manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan kajian dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai aktor non-negara, serta isu kesejahteraan sosial atau *social welfare*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan dan rujukan bagi para pemangku kepentingan non-pemerintah yang memiliki pandangan dan aspirasi yang terkait dengan menyejahterakan masyarakat umum. Dan juga, penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan praktik baik yang dilakukan LSM, seperti INFID yang memberikan layanan kesejahteraan pada masyarakat di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk mendefinisikan dan mengartikan informasi dan data yang didapatkan dari partisipan. Jadi, luaran dari penelitian kualitatif akan sangat terpengaruh oleh kemampuan pribadi peneliti, pengetahuan, refleksi pribadi, kreatifitas, dan latar belakang sosial. Penelitian ini menegaskan betapa pentingnya pengertian mengenai kondisi alami partisipan. Oleh karena itu, penelitian ini disebut sebagai pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*). Kondisinya sangat berpacu dengan kenyataan dan fakta yang ada. Sehingga pengalaman, lingkungan, dan kenyataan merupakan letak keberangkatan penelitian, bukan lagi atas dasar praduga, asumsi, ataupun konsep dari seorang peneliti. Ini berarti, peneliti mendalami keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada dan berlaku (Raco 2010, 10).

Metode penelitian kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah *grounded theory*. Menurut Kathy Charmaz, *grounded theory* adalah,

The grounded theory's methodological strategies are aimed from data analysis to construct middle-level theories directly. Their logic is central to the inductive theoretical thrust of these methods. These analyses explain the studied empirical phenomena that provide focused, abstract, conceptual theories. A set of systematic inductive methods for conducting qualitative research aimed toward theory development is what a grounded theory refers to. The term grounded theory splits into two: (a) a method of methodological strategies that is flexible and (b) the type of inquiry of this products. Progressively, researchers use the methods of inquiry for analyzing and collecting data. The resulting analyzes their strong empirical foundations of power (Charmaz 2003).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *grounded theory* adalah teori dasar yang berpacu pada metode induktif yang bersifat sistematis untuk melakukan pengembangan teori untuk penelitian kualitatif. Metodologis *grounded theory* memiliki tujuan untuk mengangkat teori langsung dari data analisis. Oleh karena itu, penelitian terhadap peran INFID dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015 - 2016 ini dilakukan dengan cara menganalisis data untuk membangun teori yang ada.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada beberapa metode, yang melibatkan pendekatan yang interpretatif dan naturalis pada data dan bahasan. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mencoba menangkap definisi yang disampaikannya. Denzin dan Lincoln menggagas makna dari penelitian kualitatif ialah penelitian yang melibatkan latar alami, dengan tujuan mengartikan kejadian yang ada dan dilaksanakan dengan beberapa metode (Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. 2008).

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Definisi dari metode deskriptif analisis dari pendapat seorang ahli, Sugiono, merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan topik yang diteliti melalui sampel atau data yang telah dikumpulkan seadanya tanpa menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan untuk umum (Sugiyono 2019).

Secara singkat, tipe penelitian deskriptif analisis mengambil dan memfokuskan sebuah isu kepada isu-isu seperti pada saat penelitian dilakukan, hasil dari penelitian yang nantinya diatur dan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya. Penelitian deskriptif analisis berfokus untuk menjawab pertanyaan siapa dan bagaimana, untuk mengetahui pihak yang terlibat dan cara suatu situasi, pengalaman sosial, atau relasi yang diteliti dapat terjadi (Neuman 2007).

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi jadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Husein Umar, sumber data primer adalah bahan yang telah diperoleh dari sumber pertama secara pribadi seperti wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti (Umar 2013, 42). Kemudian, data sekunder adalah bahan yang didapatkan dari macam-macam sumber penelitian yang sudah pernah dilakukan (Iqbal 2002, 58). Data yang telah diperoleh ini digunakan untuk menunjang sumber data primer yang telah didapatkan dari literatur, bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu, dan lain-lain.

Selanjutnya, sumber data primer dan sumber data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumen. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh kepada narasumber, dan respon dari narasumber nantinya direkam atau dicatat (Iqbal 2002, 85). Dokumentasi adalah jejak kejadian yang sudah lewat. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, dan juga karya-karya para ahli.

Dokumentasi seperti gambar hidup, foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya, seperti contohnya; karya seni gambar, film, patung/relief, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen adalah instrumen komplementer dari metode observasi dan wawancara. (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai delegasi INFID (*Program Assistant*) yang turut berkontribusi dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015-2016 untuk mendalami peran INFID sebagai LSM.

Tabel 1.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Primer	Wawancara	(a) Wawancara delegasi INFID (<i>Program Assistant</i>) yang turut berkontribusi dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015-2016 untuk mendalami peran INFID sebagai LSM	(a) Data terkait dukungan INFID dalam mengimplementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015-2016
Sekunder	Dokumen	(a) Pemaparan isi buku dan jurnal tentang peran INFID sebagai LSM di Indonesia secara umum. (b) Pemaparan informasi mengenai sejarah, status dan kedudukan INFID sebagai NGO. (c) Pemaparan peran INFID dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015-2016.	(a) Data terkait peran INFID sebagai LSM di Indonesia secara umum. (b) Data mengenai sejarah, status dan kedudukan INFID sebagai NGO. (c) Data terkait peran INFID dalam mendukung implementasi program SDGs di Indonesia pada tahun 2015-2016.

1.5.3 Teknik Validasi Data

Melalui berbagai cara dan sumber pengumpulan data, triangulasi sumber data adalah penggalian kebenaran informasi tertentu. Dalam rangka menguji kebenaran data dari penelitian ini, peneliti mengacu pada teknik triangulasi sumber. Singkatnya, tak hanya dengan cara melakukan wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, observasi terlibat (*participant observation*), catatan resmi, dokumen tertulis, dokumen sejarah, arsip, catatan atau tulisan pribadi dan foto atau gambar. Cara masing-masing tersebut akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda, yang setelahnya akan diberikan pandangan (*insights*) yang juga berbeda terkait masalah yang diteliti. Berbagai pandangan yang ada pun akan melahirkan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran (Denzin 2009, 330).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif untuk penelitian ini, yang mana digagas oleh Miles dan Hubberman, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Noeng Muhadjir menjelaskan pemahaman dari analisis data guna menata dan mencari catatan hasil wawancara, observasi, dan hal lainnya untuk meningkatkan wawasan peneliti terkait topik yang ditelaah dan memaparkannya sebagai referensi bagi pembaca secara sistematis. Di sisi lain, untuk meningkatkan wawasan tersebut, analisis harus dijalankan dengan mencari makna (Muhadjir 1998). Reduksi data adalah proses penyederhanaan melalui pemfokusan, seleksi, dan data mentah menjadi informasi yang memudahkan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Bentuk naratif adalah penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif. Data yang telah disusun pun disandingkan antara sesama untuk ditarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada. Penyajian datanya berupa berbagai informasi yang secara sistematis tersusun. Menarik sebuah kesimpulan adalah bagian paling akhir dalam analisis data yang dikerjakan, melihat reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah (Miles, B. Mathew. Huberman, Michael. 1992).

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan uraian tentang deskripsi singkat mengenai eksistensi LSM dan hubungannya dengan negara yang mengimplementasikan program SDGs.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan hasil tinjauan penulis mengenai sejumlah penelitian terdahulu guna mempelajari bagaimana penulis-penulis terdahulu melakukan pendekatan dalam menyelenggarakan penelitian sebelumnya.

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai konsep yang dipakai penulis dalam mendukung penelitian ini. Bab ini ditutup dengan kerangka pemikiran penulis serta hipotesis penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini penulis mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai analisis dan jawaban pertanyaan penelitian mengenai peran INFID dalam mendukung implementasi program SGDs di Indonesia pada tahun 2015-2016.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang penulis berikan untuk lembaga dan penulis selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian serupa.

